

SPIRIT PLURALISME DALAM KONSTRUKSI KARAKTER BANGSA INDONESIA (Sebuah Pendekatan Sosio-Historis pada Konsep Nation State)

Aan Hasanah *

***Abstract:** This article is to discuss the pluralism values in building the nation characters. Indonesia consist of plural ethnics, nations, and religions that if its pluralism is not well-maintained there will be social conflict, even worse violence which results in many victims. Recent conflicts happen on behalf of communities, ethnic, and even religion. To solve that problem, the nation-character needs to be built in order to create a high-civilized, cooperative, and peaceful nation. The nation-character can be build by the spirit of pluralism that is building the multi-cultural Indonesian into real Indonesian who understands their position to build peaceful in Indonesia. The nation-character building is applied in two forms: autonomy and heteronomy that is the building from internal and external (environment) aspects.*

***Keywords:** Pluralisme, Karakter Bangsa, Otonomi dan Heteromi*

Pluralisme adalah pandangan yang mengakui adanya keberagaman di dalam suatu bangsa. Plural berarti berjenis-jenis, pluralisme membawa implikasi sosial, politik, ekonomi, oleh karena itu pluralism menjadi dasar bagi tumbuhnya sebuah demokrasi.

Ketika sebuah negara menyatakan sebagai bangsa yang demokratis, tetapi mengabaikan pluralitas, maka bangsa tersebut akan mengalami banyak konflik dan disintegrasi baik vertikal maupun horizontal. Pluralisme berkaitan erat dengan adanya pengakuan hak hidup kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan segenap nilai yang dianutnya, agama, kepercayaan, budaya, bahasa, dan adat-istiadatnya.

Bagi bangsa Indonesia, pluralitas adalah sebuah fakta dan realitas bangsa Indonesia. pengabaian atas pluralitas akan melahirkan berbagai konflik sosial dan konflik yang bermatras agama. beberapa penelitian menunjukkan, dalam sepuluh tahun terakhir fenomena konflik pada masyarakat Indonesia merebak dan amat menghawatirkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kasus kekerasan sosial, Menurut laporan penelitian United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (unsfir) tahun 2002, kekerasan sosial di Indonesia selama 1990-2001 telah menyebabkan setidaknya 6.208 jiwa kehilangan nyawa. Diantara empat kategori kekerasan sosial itu, kekerasan komunal adalah jenis kekerasan sosial yang terparah, jika diukur dengan jumlah korban tewas. Kekerasan komunal mencatat sekitar 77% (atau 4.771 jiwa) dari total korban tewas akibat kekerasan sosial, diikuti oleh kekerasan separatis dengan 22% korban tewas (atau 1.370 jiwa)¹.

Kekerasan bermatras agama juga terjadi cukup marak, Maarif Institut mencatat ada 117 kasus hingga pertengahan September 2010 lalu. Belum termasuk kasus HKBP Ciketing, dan pembakaran masjid Ahmadiyah di Ciampea, Bogor. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibanding 2009 yang mencapai 114 kasus kekerasan berlatar belakang agama. Maraknya fenomena kekerasan ini, memberi bukti bahwa negara tidak mampu memberi perlindungan dan rasa nyaman terhadap hak asasi masyarakatnya. Ketidakseriusan

*Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹ Mohammad Zulfan Tadjoeidin, *Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi, Kasus Indonesia 1990-2001*, Project INS/99/002–Policy Support for Sustainable Social Economic Recovery, April 2002.

negara dalam menyelesaikan berbagai masalah kekerasan pada jalur hukum, memberikan ruang dan persepsi bagi masyarakat luas untuk mereproduksi serta melakukan kekerasan serupa.²

Dengan demikian maka spirit pluralitas menjadi amat penting untuk di reaktualisasi dalam kerangka membangun karakter bangsa yang unggul menuju bangsa yang berperadaban unggul. Peradaban unggul dibangun oleh seluruh elemen bangsa yang memiliki karakter kuat, positif, dan tangguh. Ketika mayoritas karakter masyarakat kuat, positif, tangguh maka peradaban yang tinggi dapat dibangun dengan baik dan sukses, sebaliknya jika mayoritas karakter masyarakat negatif maka karakter negatif dan lemah mengakibatkan peradaban yang dibangun pun menjadi lemah, sebab peradaban tersebut dibangun dalam fondasi yang amat lemah.

Karakter bangsa adalah modal dasar membangun peradaban tingkat tinggi, masyarakat yang memiliki sifat jujur, mandiri, bekerjasama, patuh pada peraturan, bisa dipercaya, tangguh dan memiliki etos kerja tinggi akan menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan baik. Ketidakteraturan sosial menghasilkan berbagai bentuk tindak kriminal, kekerasan, terorisme, konflik dll.

Realitas Keindonesiaan adalah pluralitas, walaupun mayoritas masyarakat adalah umat Islam, tetapi bukan Negara Islam. Pluralitas terjadi bukan hanya karena perbedaan agama dan budaya, tetapi dalam satu agama yang sama pun terjadi keanekaragaman pemahaman dan tafsir atas doktrin agama yang berbeda. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syafi'i Ma'arif, bahwa dalam hal doktrin iman, Islam memang satu, dalam arti Islam ditegakkan di atas landasan tauhid yang jelas dan tegas. Namun sebagai ekspresi kultural, Islam di Indonesia muncul dalam keanekaragaman wajah. Keanekaragaman ini sebagai akibat yang logis dari hasil dialogis perjalanan panjang sejarah Indonesia, dan itu harus diakui sebagai suatu hal yang alamiah. Akan tetapi, yang perlu dijaga ialah keanekaragaman ekspresi keislaman tersebut jangan sampai merusak bangunan tauhid dan persaudaraan universal sebagai suatu idealisme

² Vivanews, *Maarif Institute: Kekerasan Agama Meningkat*, 15/12/2010

pembumian doktrin yang tidak mudah diwujudkan dalam Islam. Pluralisme budaya, suku, bahasa, daerah, dan agama di Indonesia merupakan unsur yang kaya dan kuat untuk merekat integrasi nasional bila semuanya itu dianyam secara arif, saling pengertian, dan sabar.³

Karena itu, sebenarnya pluralisme, harus diarahkan kepada adanya konvergensi nasional, yaitu pemusatan pandangan ke arah satu titik yang sama menuju persatuan Indonesia. Dengan ini maka akan muncul kehidupan kosmopolit⁴, yang berarti suatu tata pergaulan Keindonesiaan baik lahiriah maupun batiniah dengan wawasan luas, meliputi seluruh masyarakat. Dan kosmopolitanisme ini akan menjadi spirit bagi nilai Keindonesiaan, karena budaya Indonesia ialah rangkuman puncak berbagai budaya daerah.⁵

Nilai-nilai Keindonesiaan yang kosmopolit dapat tumbuh melalui dua cara, yaitu cara pasif dan cara aktif. Pertumbuhan melalui cara pasif adalah mengikuti irama gerak dari dalam dirinya. Karena pertumbuhan ini berasal dari interaksi pergaulan antar keanekaragaman kelompok masyarakat, maka dapat diintrupsi dengan mudah oleh berbagai kepentingan. Oleh karena itu, nilai Keindonesiaan perlu dikembangkan dengan cara kedua, yaitu dengan cara aktif, dan tidak diserahkan hanya kepada perkembangannya yang serba aksidental.⁶

Adapun nilai-nilai Keindonesiaan itu ialah nilai-nilai luhur universal dan kosmopolitan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini tentu harus didasarkan pada agama atau budaya hasil dialog panjang dengan agama (Islam). Nilai-nilai ini mempunyai peranan yang strategis sekaligus sentral dalam membangun persatuan umat. Persatuan ini menumbuhkan kemantapan diri sendiri sebagai bangsa. Oleh karenanya pertumbuhan kemantapan itu berjalan sejajar dengan

³ A. Syafii Maarif, *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, hlm. 25.

⁴ Kosmopolitan dalam pengertian kamus sepadan artinya dengan universalitas.

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam...* hlm, 40.

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam*, hlm. 41.

pertumbuhan nilai-nilai Keindonesiaan itu sendiri. Kemantapan itu berimplikasi kepada kebebasan dari rasa takut terhadap pluralitas maupun rasa cemas kepada arus globalisme atau pengaruh asing. Sehingga kemantapan nilai-nilai Keindonesiaan menjadi pangkal adanya fase pertumbuhan lebih lanjut yang lebih penting, yaitu fase keterbukaan atau inklusivitas.⁷

Inklusivitas dalam kehidupan beragama adalah salah satu aspek yang paling penting dalam warga bangsa yang plural. Untuk itu, Cak Nur (panggilan akrab Nurcholis Madjid) mengatakan bahwa "Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia",⁸ atau dengan kata lain bahwa penduduk Indonesia adalah paling beraneka ragam agama dan budayanya di muka bumi.

Dalam konteks keanekaragaman ini, di Indonesia tidak boleh muncul tirani, baik dari kalangan mayoritas maupun minoritas. Karena Indonesia bukan negara agama. Namun demikian harus disadari oleh semua pihak dalam masyarakat, bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan paling besar jumlahnya di dunia, sebagaimana ungkapan Cak Nur, "Dilihat dari sudut pandang agama, Indonesia adalah bangsa paling besar di dunia. Tetapi secara religio-politis dan ideologis, Indonesia bukanlah 'negara Islam'".⁹

Dengan demikian, "Keindonesiaan" bangsa Indonesia sangat beragam, meskipun realitasnya dalam keberagaman tersebut mayoritas beragama Islam. Islam masuk ke Indonesia dengan cara-cara damai, bukti bahwa Islamisasi di Indonesia damai, banyak melahirkan praktek-praktik *sinkretisme*. "Hasil Islamisasi dengan cara demikian itu adalah praktik *sinkretisme*...Salah satu indikasinya adalah sistem penanggalan Jawa, yang mempertahankan asal usul Hindu,

⁷ Nurcholish Madjid, *Islam kemodernan dan keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. xi, hlm. 44.

⁸ Nurcholish Madjid, "*Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern, Pengalaman Indonesia*", dalam Mark R. Woodward, (ed.), *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998), cet. I, hlm. 91.

⁹ Nurcholish Madjid, "*Mencari Akar-akar*", hlm. 67

yaitu penghitungan kalender Shaka tetapi mengubah...dengan nama-nama Arab".¹⁰ Maka menurut Cak Nur, perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia sebagian besarnya merupakan hasil dialog antara nilai-nilai Islam yang universal dengan ciri-ciri kultural kepulauan Nusantara".¹¹

Untuk itu, modal Keindonesiaan yang paling berharga ialah persatuan, keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi dan falsafah negara, sistem pemerintahan yang meliputi seluruh tanah air, dan pembangunan ekonomi secara pragmatis. Selain itu, modal Keindonesiaan yang paling mahal adalah pengalaman bangsa Indonesia menjalani kehidupan kemasyarakatan yang pluralis. Sehingga modal tersebut, yaitu Keindonesiaan, menunjukkan adanya kecenderungan umum ke arah terwujudnya konvergensi nasional, yaitu suatu bentuk saling pengertian yang berakar dalam semangat untuk memberi dan menerima. Sikap ini bermuara pada kemantapan masing-masing kelompok, golongan, dan agama serta hilangnya kekhawatiran antar mereka.¹²

Atas dasar pluralisme internal masyarakat Indonesia dan kecenderungan ke arah konvergensi nasional yang mantap, maka pengembangan peradaban Islam di Indonesia memerlukan pemahaman dan strategi yang tepat. Dari sini kemudian memunculkan pemikiran wawasan Keindonesiaan. Wawasan Keindonesiaan adalah pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungan sosial kultural masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena itu harus diperhitungkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara bangsa yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi secara fisik, yakni negara kepulauan, keragaman suku, bahasa, adat istiadat,

¹⁰ Sinkretisme ialah perpaduan antara ajaran Islam dengan unsur non Islam misalnya unsur ajaran Hindu-Budha. Contohnya kalender Jawa yang berasal dari kalender Hindu diubah dari sistem solar (matahari) ke sistem lunar (bulan) dan nama-nama bulannya diambil dari nama-nama bulan dalam kalender Hijriah setelah dikonversi ke dalam bahasa Jawa, misalnya 'Asyura (Arab) untuk Muharram menjadi Suro (Jawa); Shafar (Arab) menjadi Sapar (Jawa); dan seterusnya, sehingga ia mengalami proses Islamisasi. Nurcholish Madjid, "*Mencari Akar-akar ...*" hlm. 94.

¹¹ Nurcholish Madjid, "*Mencari Akar-akar ...*", hlm. 95.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan...*, hlm. 35-39.

dan agama. Melihat kenyataan ini maka Indonesia harus memperhitungkan kondisi sosial budaya untuk menuju ke kemajuan.¹³

Pluralisme dan pembentukan Karakter Bangsa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Atau bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara/Indonesia.¹⁴

Sedangkan dalam kamus Wikipedia, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa, merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideologi nasionalisme.¹⁵ Masyarakat yang diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur; satu kesatuan bahasa, satu kesatuan daerah, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

Menurut Ernest Renan, bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari : (1). Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. (2). Keinginan untuk hidup bersama diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya, tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Dasar dari suatu paham kebangsaan, yang menjadi bekal bagi berdirinya suatu bangsa,

¹³ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia...*, hlm. 211.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 133

¹⁵ <http://www.id.Wikipedia.org/wiki/bangsa>

ialah suatu kejayaan bersama di zaman yang lampau, dimiliki oleh orang-orang besar dan diperolehnya kemenangan-kemenangan, sebab penderitaan itu menimbulkan kewajiban-kewajiban, yang selanjutnya mendorong kearah adanya usaha bersama. Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan bahwa hal penting yang merupakan syarat mutlak adanya bangsa adalah *plebisit*, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Apabila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya¹⁶

Fredrich Hertz dalam bukunya "*Nationality in History and Politics*" mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi sebagai berikut:

Pertama: Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.

Kedua: Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.

Ketiga: Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualisme, keaslian, atau kekhasan.

Keempat: Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

Setelah manusia memiliki identitas sebagai bangsa, mereka menuntut suatu wilayah untuk tempat tinggalnya yang kemudian dinamakan sebagai negara. Selanjutnya pengertian negara menjadi lebih luas, negara tidak hanya diartikan wilayah tetapi juga meliputi pemerintah, kedaulatan, penduduk, dan beberapa syarat lainnya.¹⁷

¹⁶ Rustam E. Tamburaka, *pengantar ilmu sejarah teori filsafat sejarah filsafat dan iptek*, (Jakarta: Rinaka Cipta: 1999), hlm. 82.

¹⁷ WartaNegara, *Latar belakang kewarganegaraan*, (University Gunadarma, 02/2011), hlm. 33

Jadi suatu Bangsa akan disatukan oleh adanya kesadaran moral untuk mewujudkan persamaan hak, kebudayaan, bahasa, agama, pluralitas dan lain sebagainya. Suatu bangsa, hanya ada karena adanya kemauan bersama. Kemauan bersama diperlukan supaya semua daerah, budaya, agama, suku bangsa memiliki kesadaran nasionalisme untuk mewujudkan peradaban yang unggul dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia.

Negara Indonesia merupakan negara bangsa (*nation state*). Nurcholish Majid mengemukakan bahwa negara bangsa adalah bangsa yang eksis di atas ikatan nasionalisme yang luas. Nurcholish menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia merupakan negara yang penuh keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya ini, di samping sebagai kekayaan juga bisa sebagai kerawanan. Maka negara bangsa yang nasional harus dalam bingkai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi.¹⁸ Negara bangsa memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa, dan berpijak pada pilar demokrasi, keadilan, dan keterbukaan. Keterbukaan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan keterbukaan bagi pemerintah untuk dikritik.¹⁹

Indonesia menuju ke arah yang demokratis, egaliter, dan adil. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beraneka ragam dan dengan budaya yang bermacam-macam pula. Namun budaya yang bermacam-macam ini ada yang bisa mendukung terwujudnya negara bangsa yang sejalan dengan cita-cita Negara tersebut.²⁰

Hal yang penting untuk dilakukan adalah, budaya yang beraneka ragam itu harus mewujudkan ke arah Keindonesiaan. Dalam perjalanan sejarah kebangsaan, proses pertumbuhan Keindonesiaan tidak terbatas pada satu tempat dan dalam satu masa. Sebagaimana sering diungkapkan oleh para pemimpin bangsa bahwa Keindonesiaan mempunyai akar-akar yang jauh dalam sejarah

¹⁸ Nurcholish Majid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), cet. III, hlm. 69.

¹⁹ Nurcholish Majid, *ibid* .., hlm. 71.

²⁰ Nurcholish Majid, *ibid*, hlm. 81.

Nusantara. Contoh nyata ialah bendera merah putih yang diyakini telah digunakan bangsa-bangsa Nusantara sejak masa-masa silam.

Akar-akar Keindonesiaan yang utama ialah kemestian lingkungan geografis sebagai negara maritim. Keadaan ini menghasilkan sifat dan jiwa kemaritiman yang berpengaruh pada berbagai gejala sosial politik. Ini menguntungkan bagi pertumbuhan sosial politik dan tentunya juga negara bangsa, karena pola budaya yang bersemangat maritim mempunyai ciri-ciri persamaan, keterbukaan, mobilitas tinggi, dan kosmopolitanisme. Terutama kosmopolitanisme dimungkinkan oleh adanya mobilitas warga yang tinggi sehingga mereka menjadi berbagai anggota sosial budaya dalam berbagai tempat dan daerah. Keadaan ini berdampak pada perataan jalan bagi pembangunan negara bangsa.²¹

Melalui perkembangan Islam di kawasan ini menimbulkan interaksi saling meneguhkan antara agama Islam dan bahasa Melayu. Agama Islam yang mengembangkan tradisi tulis menulis membuat bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa yang kaya sebagai alat komunikasi regional. Pertumbuhan saling mempengaruhi antara Islam dan bahasa Melayu karena kesejajaran sifat-sifat dasar antara keduanya yang egaliter, terbuka, dan kosmopolit memunculkan budaya yang kuat. Kemudian dengan sifat dasar bahasa Melayu ini menyebabkan ia dipilih menjadi bahasa persatuan. Maka dari sini tampak bahwa Indonesia yang ingin dibangun oleh bangsa Indonesia khususnya ialah negara bangsa yang egaliter, terbuka, kosmopolit dengan mobilitas tinggi, sejalan dengan wawasan kenegaraan modern.²²

Secara konseptual Negara Indonesia adalah negara yang menekankan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*). Di dalam negara seperti ini tumbuh dan terpelihara pluralisme, demokratisasi, egalitarianisme, inklusivisme, dan keadilan. Bagi Indonesia tidak sulit tumbuh menjadi negara bangsa karena akar-akarnya tersedia baik dari segi agama maupun dari Keindonesiaan.

²¹ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam...*, hlm. 136.

²² Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik ...*, hlm. 138.

Dari segi agama, Islam yang merupakan agama mayoritas bangsa Indonesia telah menyediakan instrumen negara bangsa dalam sejarah dan dalam ajaran. Indonesia sarat dengan budaya pluralism, demokratisasi, egalitarianisme, keterbukaan, dan keadilan.

Mengkontruksi Karakter Bangsa

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, diyakini bahwa nilai dan karakter yang secara legal-formal dirumuskan sebagai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, harus dimiliki peserta didik agar mampu menghadapi tantangan hidup pada saat ini dan di masa mendatang akan datang. Karena itu pengembangan nilai yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa yang diperoleh melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, akan mendorong mereka menjadi anggota masyarakat, anak bangsa, dan warga negara yang memiliki kepribadian unggul seperti diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

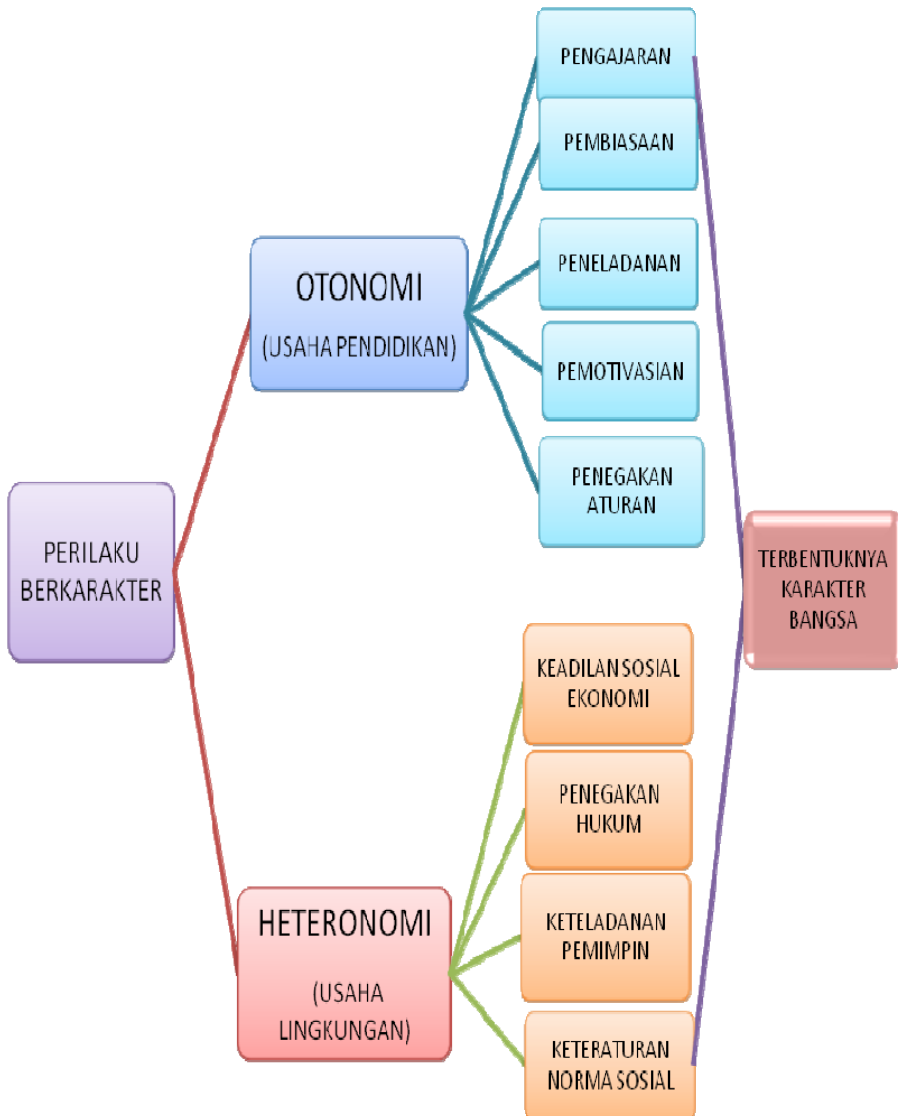
Bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama. Dalam skala tataran antar komunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras dan sebagainya, berkehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dan sah, serta diakui komunitas masyarakat lainnya (*baca: internasional*). Dari sudut pandang inilah kemudian timbul berbagai teori tentang bangsa dan negara. Karakter bangsa muncul dari komunitas-komunitas yang memiliki ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal ini pendidikan berperan penting membangun persamaan persepsi antar komunitas sehingga terjalin komunitas yang memiliki karakter yang jelas dan kuat. Jika pendidikan gagal dalam membangun persepsi antar komunitas maka yang akan terjadi adalah perpecahan dan perbedaan serta akan memudahkan nilai-nilai kebangsaan dan akan berdampak pada hilangnya karakter bangsa.

Pembentukan karakter bangsa harus bermula dari individu anggota-anggota masyarakat bangsa, karena masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup di satu tempat dengan nilai-nilai yang merekat mereka. Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu yang terbentuk berdasar tujuan yang hendak mereka capai. Hal ini karena setiap individu lahir dalam keadaan hampa budaya, lalu masyarakatnya yang membentuk budaya dan nilai-nilainya, yang lahir dari pilihan dan kesepakatan mereka. Membentuk karakter individu bermula dari pemahaman tentang diri sebagai manusia, potensi positif dan negatifnya, serta tujuan kehadirannya di pentas bumi ini. Untuk mewujudkan karakter yang dikehendaki, diperlukan lingkungan yang kondusif, pelatihan dan pembiasaan persepsi terhadap pengalaman hidup dan lain-lain. Disisi lain, karakter yang baik harus terus diasah dan diasuh, karena ia adalah proses yang *continuum*.

Karakter Bangsa dibangun oleh dua aspek yang saling terkait, otonomi dan Heteronomi. Aspek Otonomi merujuk pada proses internalisasi dalam diri individu yang merupakan usaha dan hasil dari pendidikan karakter yang di implementasikan melalui pengajaran, pembiasaan, pemotivasian, peneladanan dan penegakan aturan. Sedangkan Aspek Heteronomi merupakan produk yang dihasilkan di luar pendidikan dimana ia memegang peran yang amat urgent, karena merupakan faktor dominan dalam menentukan perilaku seseorang dalam konteks lingkungan sosialnya. Aspek heteronomi adalah; adanya pemerataan keadilan sosial dan ekonomi, penegakan hukum yang konsisten, adanya keteladanan dari para pemimpin Bangsaanya serta adanya keteraturan norma-norma sosial.

Untuk melihat bagaimana proses pembentukan karakter bangsa, bisa lebih jelas digambarkan dalam skema dibawah ini.

Skema
Aspek-aspek pembentuk karakter Bangsa



Penjelasan skema

Karakter dibangun secara konseptual dengan menggunakan pilar moral. Karakter individual maupun komunal dibangun melalui dua aspek yang saling terkait yakni faktor otonom dan heteronom. Otonomi merupakan usaha dalam proses pendidikan karakter yang diimplementasikan melalui pengajaran, pembiasaan, peneledanan, pemotivasian, dan penegakan aturan. Sementara Heteronomi merupakan usaha yang dilakukan oleh lingkungan (luar pendidikan) yakni adanya keadilan sosial ekonomi, penegakan hukum, keteladanan pemimpin serta keteraturan norma-norma sosial. Untuk membentuk karakter Bangsa dibutuhkan sinergi yang kuat antara faktor otonomi dengan faktor heteronomi. Jika salah satunya rapuh atau bahkan saling bertentangan, maka karakter bangsa tidak akan terbentuk secara efektif.

Pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai inti (*core ethical values*) yang ditransformasikan dalam proses pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lickona bahwa agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif, maka terdapat sebelas prinsip utama, yaitu:

1. Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai fondasi karakter yang baik.
2. Definisikan 'karakter' secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku.
3. Gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter.
4. Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian, 4.beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral.
5. Buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk berhasil.
6. Usahakan mendorong motivasi diri siswa.

7. Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan siswa.
8. Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter.
9. Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
10. Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, 11. dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.²³

Dalam pendidikan karakter penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti, seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi, dan kegigihan--sebagai basis karakter yang baik. Sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai dimaksud, mendefinisikannya dalam bentuk perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, mencontohkan nilai-nilai itu, mengkaji dan mendiskusikannya, menggunakannya sebagai dasar dalam hubungan antar manusia, dan mengapresiasi manifestasi nilai-nilai tersebut di sekolah dan masyarakat. Yang terpenting, semua komponen sekolah bertanggung jawab terhadap standar-standar perilaku yang konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti tersebut.

Nilai-nilai etika inti tersebut akan membentuk karakter individu yang dapat menghargai perbedaan, toleran, peduli, tanggung jawab, jujur dan menjadi warga Negara yang baik merupakan modal bagi terbentuknya Indonesia yang unggul dengan segala keunikannya, Indonesia yang plural, demokratis, egaliter dan berkeadilan.

²³ Thomas Lickona, *Educating For Character* (New York: Bantam, 1991), hlm. 213

Disamping itu Indonesia memiliki modal atau kekuatan yang memadai untuk menjadi bangsa besar dan negara yang kuat. Modal itu antara lain adalah luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, kekayaan budaya, kesatuan bahasa, ketaatan pada ajaran agama, dan sistem pemerintahan yang demokratis.

Penutup

Spirit Pluralisme adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak bisa diabaikan. Karena ia adalah fakta dan realitas bangsa ini yang sudah melewati sejarah panjang pergulatan dalam pembentukan Negara bangsa (nation state) Indonesia. Pengabaian atas pluralitas akan melahirkan berbagai macam konflik dan disintegrasi bangsa, sebagaimana menyeruaknya berbagai fenomena konflik sosial dan konflik bermatras agama yang meningkat tajam baik kuantitas maupun kualitasnya dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Dengan demikian spirit pluralism harus menjadi core ethical values, nilai etika inti sebagai pilar dalam pembentukan karakter bangsa dengan menguatkan aspek otonomi melalui pendidikan dan aspek heteronomi yakni terciptanya keadilan social ekonomi, adanya penegakan hukum yang konsisten , adanya keteladanan para pemimpin bangsa serta terciptanya keteraturan norma sosial.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Dinamika Islam Kultural*. Bandung: Miza, 2000.
- Hidayat, Komaruddin. *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Grafida Pers, 1995.
- Huitt, W., & Vessels, G. *Character education*. In J. Guthrie (Ed.), *The encyclopedia of education* (2nd ed.). New York: Macmillan, 2002.
- Husein, Sayyid dan Ali Ashraf, 1989. *Horizon Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1989.

- K. Helkama, Myry, L. *The Role of Value Priorities and Professional Ethics Training Moral Sensitivity*", dalam *The Journal of Moral Education*, Volume 31 Number 1 March, 2002.
- Lickon, Thomas. *Educating for character: how our schools can teach respect and responsibility*. Bantam: Michigan University, 1991.
- Lickona, Thomas & Mathew David. *Smart& Good High School*. Washington DC: Character Education Partnership, 2005.
- Lickona, Thomas. *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam, 1991.
- M. Bakry, Noor. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 1994.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*, Cet. III. Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. XII, Bandung: Mizan, 1999.
- Madjid, Nurcholish. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Madjid, Nurcholis. *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mahmud Subhi, Ahmad. *Al-Falsafah al-Akhlaqiah fi al-Fikr al-Islamy*. Mesir: Dar al-Ma'arif, tt
- Mansyur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlaq*. Bandung: Rineka Cipta, 1995.

W., Taylor, Paul. *Problem of Moral Philosophy*. California: Dickenson Publishing Company, Inc, 1967.

Yayasan Amal Bhakti Ibu, *Anak Indonesia Membangun Budaya Damai*. Jakarta:Yayasan Amal Bhakti, 2005.